

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN

---

MILIK DINAS



**HANJAR SATUAN PENDIDIKAN**  
**CORE 1 MANAJEMEN STRATEGIK**  
**ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN**  
**MANAJEMEN SISTEM KEAMANAN NASIONAL**

untuk

**PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM**  
**SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN TINGGI**

**SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI**  
**2026**

## DAFTAR ISI

<b>MODUL</b>	<b>ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN SISTEM KEAMANAN NASIONAL</b>	
	Pendahuluan.....	1
	Standar Kompetensi .....	2
	Kompetensi Dasar .....	3
	Materi Pelajaran .....	4
	Metode Pembelajaran.....	6
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	7
	Kegiatan Pembelajaran .....	8
	Tagihan / Tugas .....	9
	Lembar Kegiatan .....	9
	Bahan Bacaan .....	10
	<b>POKOK BAHASAN 1</b>	
	<b>ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS UNTUK MERUMUSKAN IMPLIKASI KEBIJAKAN BAGI POLRI DI TINGKAT NASIONAL</b>	
	A. Dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geosiber sebagai variabel lingkungan eksternal.....	10
	B. PESTEL pada skala global dan regional .....	16
	C. Analisis SWOT makro untuk menilai posisi institusi dalam lingkungan strategi .....	23
	D. Metode <i>strategic foresight</i> untuk memproyeksikan ancaman dan peluang 10-20 tahun ke depan.....	25
	E. Isu-isu strategis yang berpotensi mengubah lanskap keamanan nasional .....	26

**POKOK BAHASAN 2****KOMPONEN, DAN HUBUNGAN ANTAR-SUBSISTEM DALAM SISTEM KEAMANAN NASIONAL SERTA PERAN KUNCI POLRI DI DALAMNYA**

A. Sistem keamanan nasional dan membedakannya dari sistem pertahanan negara .....	28
B. Pilar-pilar Siskamnas.....	29
C. Dasar hukum dan regulasi yang mengatur Siskamnas .....	30
D. Manajemen sinergi antar-subsistem keamanan .....	31

**POKOK BAHASAN 3****PERUMUSAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN DI TINGKAT NASIONAL YANG ADAPTIF, KOMPREHENSIF, DAN BERBASIS ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS**

A. Siklus kebijakan keamanan nasional.....	33
B. Model rational-comprehensive dan incremental policy making dalam konteks keamanan.....	34
C. Kebijakan keamanan adaptif yang fleksibel terhadap perubahan lingkungan strategis yang cepat.....	36
D. Rencana kontinjensi strategis ( <i>contingency planning</i> ) untuk skenario ancaman <i>high-impact</i> dan <i>low-probability</i> .....	38
E. Dampak kebijakan ( <i>policy impact assessment</i> ) polri terhadap sektor lain (ekonomi, politik, sosial).....	41
Rangkuman .....	45
Latihan .....	46

## MODUL

# ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN SISTEM KEAMANAN NASIONAL



18 JP (810 Menit)




## PENDAHULUAN


Keamanan nasional merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian, negara dituntut memiliki kemampuan adaptif dalam membaca perubahan sekaligus responsif dalam mengelola ancaman. Pada tataran praktis, institusi seperti Polri, TNI, lembaga intelijen, kementerian, dan pemerintah daerah menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga diperlukan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana lingkungan strategis dibentuk, dianalisis, dan dipetakan, serta bagaimana sistem keamanan nasional dikelola secara holistik.

Lingkungan strategis dewasa ini tidak lagi bersifat linear dan mudah diprediksi. Fenomena global seperti rivalitas geopolitik, kompetisi teknologi, perubahan iklim, digitalisasi, perang informasi, dan ancaman siber telah memperluas spektrum ancaman keamanan nasional. Pada saat yang sama, dinamika domestik seperti urbanisasi, polarisasi politik, intoleransi, ketimpangan ekonomi, kriminalitas transnasional, serta kerentanan sosial budaya turut memengaruhi stabilitas internal. Kompleksitas ini menuntut hadirnya analisis strategis yang tidak hanya berfokus pada identifikasi ancaman, tetapi juga memahami interaksi antaraktor, antarwilayah, dan antar-domain (daratan, laut, udara, ruang siber, serta ruang informasi).


Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman sosial budaya yang tinggi, analisis lingkungan strategis memiliki karakter yang khas. Letak geografis yang berada pada persilangan jalur perdagangan dunia, keberadaan sumber daya alam yang melimpah, serta struktur demografi yang besar menempatkan Indonesia pada posisi strategis sekaligus rentan. Polri sebagai aktor kunci dalam penyelenggaraan keamanan dalam negeri dituntut mampu membaca tanda-tanda perubahan (*strategic foresight*),

	<p>mengidentifikasi risiko, dan melakukan prediksi terhadap potensi ancaman yang dapat berdampak pada keamanan nasional.</p> <p>Oleh karena itu, modul ini disusun untuk memberikan kerangka analitis yang terintegrasi dan dapat digunakan oleh perwira Polri dalam memahami dan menilai lingkungan strategis secara komprehensif. Analisis lingkungan strategis tidak hanya mengkaji faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan, dan teknologi, tetapi juga memetakan <i>drivers of change</i>, <i>critical uncertainties</i>, <i>emerging threats</i>, dan <i>high-impact events</i> yang berpotensi mempengaruhi stabilitas nasional. Dengan pendekatan ini, peserta didik diharapkan mampu melihat persoalan keamanan tidak secara parsial, tetapi sebagai sistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi.</p> <p>Modul ini juga menguraikan konsep dan praktik Manajemen Sistem Keamanan Nasional sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai instrumen kekuasaan negara (<i>instruments of national power</i>), termasuk diplomasi, militer, ekonomi, penegakan hukum, intelijen, serta kolaborasi masyarakat. Sistem keamanan nasional dalam paradigma modern tidak hanya bertumpu pada <i>state security</i>, tetapi juga <i>human security</i>, <i>public safety</i>, dan <i>community resilience</i>. Di sinilah Polri memainkan peran strategis, mulai dari pencegahan, deteksi dini, manajemen krisis, mitigasi risiko, sampai pemulihan pascakejadian.</p> <p>Dengan memadukan analisis lingkungan strategis dan manajemen keamanan nasional, modul ini bertujuan untuk membentuk pola pikir strategis (<i>strategic mindset</i>) bagi peserta pendidikan. Akhirnya, modul ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan analitis, tetapi juga membangun kepekaan strategis dan sikap antisipatif terhadap setiap bentuk ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Dengan demikian, perwira Polri dapat berkontribusi secara optimal dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat daya tahan negara, dan memastikan penyelenggaraan keamanan yang modern, profesional, dan berkelanjutan.</p>
--	--

	<p><b>STANDAR KOMPETENSI</b></p>
	<p>Menganalisis lingkungan strategis pada tingkat makro (nasional dan global), serta menguasai Manajemen Sistem Keamanan Nasional (Siskamnas) untuk perumusan kebijakan tingkat tinggi yang menjamin stabilitas dan kepentingan negara.</p>


	<h2 style="text-align: center;">KOMPETENSI DASAR</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengaplikasikan metode dan kerangka analisis lingkungan strategis (PESTEL, SWOT, makro, <i>foresight</i>) untuk merumuskan implikasi kebijakan bagi Polri di tingkat nasional.       <p><b>Indikator hasil belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menganalisis dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geosiber sebagai variabel lingkungan eksternal.</li> <li>b. Menerapkan kerangka PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, Legal) pada skala global dan regional.</li> <li>c. Melakukan Analisis SWOT, makro untuk menilai posisi institusi dalam lingkungan strategis.</li> <li>d. Menggunakan metode <i>strategic foresight (scanning, forecasting, visioning)</i> untuk memproyeksikan ancaman dan peluang 10-20 tahun ke depan.</li> <li>e. Mengidentifikasi Isu-isu Strategis yang berpotensi mengubah lanskap keamanan nasional (misalnya, <i>disruptive technology</i>, pergeseran aliansi global).</li> </ol> </li> <li>2. Memahami filosofi, komponen, dan hubungan antar-subsistem dalam sistem keamanan nasional serta peran kunci Polri di dalamnya.       <p><b>Indikator hasil belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendefinisikan Siskamnas dan membedakannya dari Sistem Pertahanan Negara.</li> <li>b. Menganalisis pilar-pilar Siskamnas (keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan siber, keamanan informasi).</li> <li>c. Mengkaji dasar hukum dan regulasi yang mengatur Siskamnas.</li> <li>d. Menganalisis manajemen sinergi antar-subsistem keamanan.</li> <li>e. Menganalisis hubungan dan sinergi antara subsistem keamanan publik, keamanan negara, dan keamanan siber.</li> <li>f. Merumuskan model koordinasi strategis antara Polri, TNI, Badan Intelijen, dan Lembaga Penegak Hukum lainnya.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>3. Mampu merumuskan dan menganalisis kebijakan keamanan di tingkat nasional yang adaptif, komprehensif, dan berbasis analisis lingkungan strategis.</p> <p><b>Indikator hasil belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis siklus kebijakan keamanan nasional (agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi).</li> <li>Menerapkan model <i>rational-comprehensive dan incremental policy making</i> dalam konteks keamanan.</li> <li>Merumuskan kebijakan keamanan adaptif yang fleksibel terhadap perubahan lingkungan strategis yang cepat.</li> <li>Menyusun rencana kontinjensi strategis (<i>contingency planning</i>) untuk skenario ancaman <i>high-impact dan low-probability</i>.</li> <li>Menganalisis dampak kebijakan (<i>policy impact assessment</i>) Polri terhadap sektor lain (ekonomi, politik, sosial).</li> </ol> <p>4. Mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi Siskamnas, serta merumuskan <i>leadership legacy</i> yang berfokus pada ketahanan dan stabilitas nasional.</p> <p><b>Indikator hasil belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian (<i>decision making under uncertainty</i>) dalam konteks ancaman mendadak.</li> <li>Memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi (misalnya, di Kemenko Polhukam/Wantimpres) dengan fokus pada hasil dan solusi.</li> </ol>
--	---


	<p><b>MATERI PELAJARAN</b></p>
	<p>1. <b>Pokok Bahasan 1:</b></p> <p>Analisis lingkungan strategis untuk merumuskan implikasi kebijakan bagi Polri di tingkat nasional.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geosiber sebagai variabel lingkungan eksternal.</li> <li>kerangka PESTEL pada skala global dan regional.</li> </ol>


	<p>c. Analisis SWOT, makro untuk menilai posisi institusi dalam lingkungan strategis.</p> <p>d. Metode <i>strategic foresight (scanning, forecasting, visioning)</i> untuk memproyeksikan ancaman dan peluang 10-20 tahun ke depan.</p> <p>e. Isu-isu strategis yang berpotensi mengubah lanskap keamanan nasional (misalnya, disruptive technology, pergeseran aliansi global).</p> <p><b>2. Pokok Bahasan 2:</b></p> <p>Filosofi, komponen, dan hubungan antar-subsistem dalam Siskamnas serta peran kunci Polri di dalamnya.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <p>a. Siskamnas dan membedakannya dari Sistem Pertahanan Negara.</p> <p>b. Pilar-pilar Siskamnas.</p> <p>c. Dasar hukum dan regulasi yang mengatur Siskamnas.</p> <p>d. Manajemen sinergi antar-subsistem keamanan.</p> <p>e. Hubungan dan sinergi antara subsistem keamanan publik, keamanan negara, dan keamanan siber.</p> <p>f. Model koordinasi strategis antara Polri, TNI, Badan Intelijen, dan Lembaga Penegak Hukum lainnya.</p> <p><b>3. Pokok Bahasan 3:</b></p> <p>Perumusan dan analisis kebijakan keamanan di tingkat nasional yang adaptif, komprehensif, dan berbasis analisis lingkungan strategis.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <p>a. Siklus kebijakan keamanan nasional (agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi).</p> <p>b. Model <i>Rational-Comprehensive</i> dan <i>Incremental Policy Making</i> dalam konteks keamanan.</p> <p>c. Peran <i>think tank</i> dan akademisi dalam menyediakan input analitis untuk kebijakan keamanan.</p> <p>d. Kebijakan keamanan adaptif yang fleksibel terhadap perubahan lingkungan strategis yang cepat.</p> <p>e. Rencana kontinjensi strategis (<i>contingency planning</i>) untuk skenario ancaman <i>high-impact</i> dan <i>low-probability</i>.</p>
--	--

	<p><b>4. Pokok Bahasan 4:</b></p> <p>Implementasi dan evaluasi siskamnas, serta merumuskan <i>leadership legacy</i> yang berfokus pada ketahanan dan stabilitas nasional.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian (<i>decision making under uncertainty</i>) dalam konteks ancaman mendadak.</li> <li>b. Koordinasi tingkat tinggi (misalnya, di Kemenko Polhukam/Wantimpres) dengan fokus pada hasil dan solusi.</li> </ol>
--	---


	<p><b>METODE PEMBELAJARAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang analisis lingkungan strategis dan manajemen sistem keamanan nasional.</li> <li>2. <b>Metode <i>Brainstroming</i> (curah pendapat)</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan.</li> <li>3. <b>Pembelajaran Kooperatif (<i>Cooperative Learning</i>)</b> Metode ini digunakan untuk mendorong interaksi sosial, saling ketergantungan positif, dan pengembangan keterampilan sosial serta kognitif melalui kerja sama dalam kelompok.</li> <li>4. <b>Metode <i>Problem Based Learning</i></b> Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dengan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah sebagai cara untuk mengembangkan pemahaman konsep dan keterampilan kritis.</li> <li>5. <b>Metode <i>Project Based Learning</i></b> Metode ini bertujuan untuk mengembangkan proyek yang signifikan, yang menekankan pada pemecahan masalah, kolaborasi, dan keterampilan praktis.</li> </ol>


	<p><b>6. Metode Penugasan</b></p> <p>Metode ini bertujuan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume terkait materi yang disampaikan.</p>
--	--


	<p><b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b></p>
	<p><b>1. Alat/Media:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard.</i></li> <li>b. <i>Flipchart.</i></li> <li>c. Komputer/laptop.</li> <li>d. LCD dan <i>screen.</i></li> <li>e. <i>Laser point.</i></li> <li>f. Pengeras suara/<i>sound system.</i></li> </ul> <p><b>2. Bahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas.</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ul> <p><b>3. Sumber Belajar</b></p> <p>Rujukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber. Jakarta: BSSN.</li> <li>b. Darumaya, B., Maarif, S., Toruan, T. S. L., &amp; Swastanto, Y. (2023). Pemikiran potensi ancaman perang siber di Indonesia: Kajian strategi pertahanan. <i>Jurnal Keamanan Nasional</i>, 9(2), 299–324.</li> <li>c. Kirchner, E. J. (2024). <i>Geo-economic and geopolitical developments in EU–Asia security relations. Asia Europe Journal</i>, 22(3), 333–349. <i>North Atlantic Treaty Organization (NATO), Allied Command Transformation. (2023). Strategic foresight analysis 2023.</i> NATO ACT.</li> <li>d. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). <i>Building anticipatory capacity with strategic foresight in government.</i> OECD Publishing.</li> <li>e. <i>World Economic Forum. (2025). Global cybersecurity outlook 2025. World Economic Forum.</i></li> </ul>

	<h2>KEGIATAN PEMBELAJARAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tahap awal : 10 menit</b>  Pendidik melakukan apersepsi, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuka kelas dan memberikan salam.</li> <li>b. Perkenalan.</li> <li>c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Tahap inti : 790 menit</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Tahap inti I: pembahasan materi analisis lingkungan strategis dan manajemen sistem keamanan nasional. (300 menit)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara) mengeksplor pengalaman terkait analisis lingkungan strategis dan manajemen sistem keamanan nasional.</li> <li>2) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merumuskan implikasi kebijakan bagi Polri di tingkat nasional..</li> </ol> </li> <li>b. <b>Tahap inti II: diskusi materi analisis lingkungan strategis dan manajemen sistem keamanan nasional. (490 menit)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik melalui Pokjar masing-masing untuk mendiskusikan tentang analisis lingkungan strategis dan manajemen sistem keamanan nasional.</li> <li>2) Pendidik (Widyaiswara) menunjuk salah satu Pokjar untuk mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh Pokjar lain.</li> <li>3) Pendidik (Widyaiswara) memberikan ulasan dan penguatan materi analisis lingkungan strategis dan manajemen sistem keamanan nasional.</li> <li>4) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik secara perorangan untuk membuat resume dan laporan hasil diskusi materi analisis lingkungan strategis dan manajemen sistem keamanan nasional.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

	<p><b>3. Tahap akhir : 10 menit</b></p> <p>Pendidik (Widyaiswara) mengakhiri kegiatan pembelajaran, yang mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan penguatan materi, dengan cara memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</li> <li>b. Menjelaskan keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.</li> <li>c. Menyampaikan tindaklanjut dari kegiatan pembelajaran dalam bentuk penugasan dan sebagainya.</li> </ol>
--	--

	<p><b>TAGIHAN / TUGAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil diskusi Pokjar terkait materi yang disampaikan.</li> <li>2. Peserta didik mengumpulkan tugas NKP 1 sesuai dengan PPKT dalam bentuk pdf di <i>upload</i> ke aplikasi SIAP.</li> </ol>
---	---

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil diskusi Pokjar terkait materi yang disampaikan.</li> <li>2. Resume dengan tulisan tangan sesuai dengan PPKT.</li> </ol>
---	---

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p><b>POKOK BAHASAN 1</b></p> <p><b>ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS UNTUK MERUMUSKAN IMPLIKASI KEBIJAKAN BAGI POLRI DI TINGKAT NASIONAL</b></p> <p><b>A. Dinamika Geopolitik, Geoekonomi, dan Geosiber sebagai Variabel Lingkungan Eksternal</b></p> <p>Perubahan lingkungan strategis global saat ini berlangsung semakin cepat, kompleks, dan multidimensional. Hubungan antarnegara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer dan batas teritorial, tetapi juga oleh interaksi kepentingan ekonomi, teknologi, serta penguasaan ruang siber. Kondisi ini mendorong perlunya kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika lingkungan eksternal yang memengaruhi stabilitas keamanan, kedaulatan negara, dan pengambilan kebijakan strategis.</p> <p>Dalam konteks tersebut, dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geosiber menjadi variabel lingkungan eksternal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Geopolitik merefleksikan bagaimana distribusi kekuatan, posisi geografis, serta kepentingan strategis negara membentuk konfigurasi hubungan internasional dan pola konflik maupun kerja sama global. Geoekonomi menempatkan instrumen ekonomi—seperti perdagangan, investasi, rantai pasok global, dan kontrol sumber daya—sebagai alat utama dalam persaingan dan pengaruh antarnegara. Sementara itu, geosiber menunjukkan bagaimana ruang siber berkembang menjadi domain strategis baru yang memengaruhi keamanan nasional, stabilitas politik, dan ketahanan sosial melalui informasi, teknologi digital, dan infrastruktur kritis.</p> <p>Ketiga dimensi tersebut membentuk lingkungan eksternal yang dinamis dan penuh ketidakpastian, di mana ancaman dan peluang sering kali muncul secara simultan. Interaksi antara geopolitik, geoekonomi, dan geosiber menciptakan spektrum tantangan baru, mulai dari rivalitas kekuatan besar, tekanan ekonomi lintas negara, hingga serangan siber dan perang informasi yang bersifat asimetris. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap ketiga variabel ini menjadi prasyarat penting dalam merumuskan kebijakan nasional yang adaptif,</p>

responsif, dan berorientasi pada kepentingan strategis jangka panjang.

#### 1. Dinamika Geopolitik

Geopolitik merupakan kajian strategis yang menelaah bagaimana interaksi antara kekuatan negara, kondisi geografis, serta kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan membentuk pola hubungan internasional. Dalam perspektif geopolitik, ruang (*space*) tidak hanya dipahami sebagai wilayah fisik, tetapi juga sebagai arena perebutan pengaruh, akses sumber daya, jalur perdagangan, serta kontrol keamanan regional dan global. Oleh karena itu, dinamika geopolitik selalu terkait erat dengan perubahan konfigurasi kekuatan global dan kepentingan strategis aktor-aktor utama dunia.

Dalam konteks global kontemporer, hubungan internasional ditandai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar (*great power competition*) antara Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa. Rivalitas ini tidak lagi terbatas pada dimensi militer, tetapi juga meluas ke bidang ekonomi, teknologi, energi, dan pengaruh ideologis. Pergeseran pusat gravitasi kekuatan dunia ke kawasan Indo-Pasifik menjadikan wilayah ini sebagai episentrum baru geopolitik global. Kawasan Indo-Pasifik dipandang strategis karena menjadi jalur utama perdagangan dunia, pusat pertumbuhan ekonomi global, serta wilayah dengan kepadatan kepentingan keamanan yang tinggi.

Laut Cina Selatan merupakan salah satu titik paling krusial dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Wilayah ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga merupakan jalur pelayaran internasional yang vital bagi perdagangan global. Klaim tumpang tindih antara sejumlah negara, aktivitas militer yang semakin intensif, serta pembangunan kekuatan maritim oleh negara-negara besar telah meningkatkan eskalasi ketegangan di kawasan tersebut. Kondisi ini berdampak langsung pada stabilitas keamanan Asia Tenggara dan menempatkan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dalam posisi strategis sekaligus dilematis.

Bagi Indonesia, meskipun bukan negara pengklaim utama di Laut Cina Selatan, dinamika geopolitik di kawasan ini memiliki implikasi langsung terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Laut Natuna Utara. Aktivitas kapal asing, baik sipil maupun militer, serta praktik *gray zone tactics* menuntut Indonesia untuk memperkuat diplomasi

	<p>pertahanan, kehadiran militer yang terukur, dan penegakan hukum laut secara konsisten. Diplomasi pertahanan Indonesia tidak hanya diarahkan untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga untuk berperan aktif sebagai penyeimbang (<i>balancer</i>) dan penjaga stabilitas kawasan melalui mekanisme multilateral dan kerja sama regional.</p> <p>Seiring dengan menguatnya orientasi geopolitik global ke Indo-Pasifik, posisi Indonesia semakin strategis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan penghubung utama antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia menegaskan peran sentral Indonesia dalam menjaga keamanan jalur laut internasional, stabilitas maritim, serta kerja sama regional berbasis prinsip perdamaian dan hukum internasional. Namun, posisi strategis tersebut sekaligus menjadikan Indonesia rentan terhadap tekanan geopolitik, pengaruh kekuatan besar, serta potensi tarik-menarik kepentingan global.</p> <p>Dalam konteks ini, tantangan geopolitik Indonesia tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal, yaitu bagaimana memperkuat ketahanan nasional, kapasitas pertahanan maritim, serta kohesi politik dan diplomasi luar negeri yang bebas aktif. Indonesia dituntut untuk mampu mengelola kepentingan nasional secara cermat, menjaga otonomi strategis, dan memanfaatkan posisinya secara optimal tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Dengan demikian, geopolitik Indo-Pasifik tidak hanya menjadi arena tantangan, tetapi juga peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat peran dan kepemimpinannya di tingkat regional maupun global.</p> <p>2. Dinamika Geoekonomi</p> <p>Geoekonomi merujuk pada penggunaan instrumen ekonomi sebagai sarana politik untuk mencapai kepentingan strategis suatu negara maupun aktor non-negara. Dalam praktiknya, kebijakan perdagangan, penguasaan rantai pasok global, kontrol atas sumber daya strategis, investasi lintas negara, serta dominasi teknologi ekonomi menjadi alat pengaruh yang sama efektifnya dengan kekuatan militer. Geoekonomi dengan demikian membentuk medan persaingan baru yang bersifat struktural, jangka panjang, dan berdampak langsung terhadap stabilitas nasional.</p> <p>Lanskap geoekonomi global saat ini ditandai oleh meningkatnya proteksionisme, perang dagang, fragmentasi rantai pasok, serta politisasi perdagangan dan investasi.</p>
--	---

	<p>Ketergantungan ekonomi antarnegara menciptakan kerentanan baru, di mana gangguan pada satu simpul rantai pasok dapat memicu efek domino terhadap stabilitas harga, inflasi, dan ketahanan industri nasional. Fluktuasi harga komoditas strategis—energi, pangan, dan mineral kritis—tidak hanya berdampak pada kinerja ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu instabilitas sosial dan tekanan politik di tingkat domestik.</p> <p>Bagi Indonesia, dinamika geoekonomi tercermin dalam persaingan menarik investasi asing, ketergantungan pada impor bahan baku dan teknologi, serta sensitivitas tinggi terhadap gejolak pasar global. Ketergantungan ini menempatkan sektor-sektor strategis seperti energi, pangan, dan infrastruktur pada posisi rentan terhadap tekanan eksternal. Gangguan rantai pasok global berpotensi meningkatkan biaya produksi, mendorong inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan memperlebar kerentanan sosial-ekonomi yang pada gilirannya dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional.</p> <p>Seiring dengan transformasi ekonomi digital, dinamika geoekonomi juga meluas ke ruang siber. Persaingan antarnegara bergeser ke penguasaan teknologi strategis seperti data besar, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan sistem pembayaran digital. Kontrol atas infrastruktur dan ekosistem digital tidak hanya menentukan keunggulan ekonomi, tetapi juga posisi tawar politik dan keamanan. Dalam konteks ini, ruang siber menjadi arena baru geoekonomi, di mana kekuatan ekonomi, teknologi, dan informasi saling berkelindan.</p> <p>Perkembangan tersebut turut memunculkan tantangan baru dalam domain penegakan hukum dan keamanan ekonomi. Kejahatan lintas negara seperti penipuan digital, pencucian uang berbasis kripto, penyalahgunaan platform finansial digital, serta manipulasi sistem ekonomi digital berkembang seiring integrasi ekonomi global dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, dinamika geoekonomi tidak lagi dapat dipahami semata sebagai isu ekonomi, melainkan sebagai variabel strategis yang memengaruhi ketahanan nasional, keamanan, dan kedaulatan negara secara menyeluruh.</p> <p>3. Dinamika Geosiber</p> <p>Geosiber merupakan domain strategis baru yang setara dengan darat, laut, udara, dan antariksa. Geosiber mencerminkan persaingan, interaksi, dan konflik antaraktor negara maupun non-negara di ruang siber yang berdampak</p>
--	---

	<p>langsung terhadap keamanan nasional, stabilitas politik, dan ketahanan ekonomi. Tidak adanya batas teritorial yang jelas, tingginya kecepatan serangan, serta anonimitas pelaku menjadikan ruang siber sebagai medan ancaman yang kompleks dan sulit dikendalikan dengan pendekatan keamanan konvensional.</p> <p>Dalam konteks keamanan dalam negeri, ancaman geosiber berpotensi menimbulkan gangguan strategis tanpa eskalasi fisik terbuka. Serangan terhadap infrastruktur vital nasional—seperti sistem perbankan, jaringan listrik, telekomunikasi, transportasi, dan layanan pemerintahan—dapat melumpuhkan fungsi negara, mengganggu stabilitas sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Bagi Polri, dinamika ini menempatkan kejahatan siber sebagai isu keamanan strategis, bukan sekadar tindak pidana teknologi informasi.</p> <p>Bentuk ancaman geosiber yang dihadapi antara lain ransomware, pencurian dan kebocoran data strategis, penipuan digital berskala besar, serta disinformasi dan manipulasi opini publik. Disinformasi politik dan operasi pengaruh di ruang digital berpotensi memicu polarisasi sosial, konflik horizontal, dan instabilitas keamanan, terutama pada momentum strategis nasional. Oleh karena itu, Polri dituntut memiliki kemampuan respons siber yang adaptif, berbasis intelijen, serta terintegrasi dengan sistem keamanan nasional.</p> <p>Pada tataran global, geosiber juga digunakan sebagai instrumen persaingan kekuatan besar. Negara-negara memanfaatkan operasi siber sebagai alat tekanan politik, ekonomi, dan diplomasi dalam bentuk konflik terselubung (<i>below the threshold conflict</i>). Penguasaan teknologi enkripsi, kecerdasan buatan, dan data strategis menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tawar dan pengaruh geopolitik suatu negara. Kondisi ini memperluas spektrum ancaman keamanan nasional Indonesia ke ranah non-fisik yang sulit diprediksi.</p> <p>Dalam perspektif Sespinti Polri, pengelolaan dinamika geosiber menuntut kepemimpinan strategis yang mampu mengintegrasikan pendekatan keamanan, penegakan hukum, dan kebijakan nasional. Penguatan ketahanan geosiber harus dilakukan melalui koordinasi dan sinergi antara Polri, TNI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta kementerian dan lembaga terkait. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia siber, pengembangan sistem peringatan dini, dan harmonisasi regulasi menjadi</p>
--	---

	<p>elemen kunci dalam membangun ketahanan siber nasional yang berkelanjutan.</p> <p>Dengan demikian, dinamika geosiber perlu dipahami oleh perwira tinggi Polri sebagai variabel lingkungan eksternal strategis yang memengaruhi pengambilan keputusan tingkat nasional. Kemampuan membaca, mengantisipasi, dan merespons ancaman siber secara komprehensif menjadi bagian penting dari kompetensi kepemimpinan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di era digital.</p> <p>4. Integrasi Geopolitik, Geoekonomi, dan Geosiber sebagai Tantangan Eksternal</p> <p>Dinamika keamanan kontemporer tidak lagi berdiri pada satu dimensi tunggal, melainkan terbentuk dari interaksi erat antara geopolitik, geoekonomi, dan geosiber. Ketiga dimensi ini saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain, membentuk pola ancaman baru yang lebih kompleks, adaptif, dan sulit diprediksi. Persaingan geopolitik mendorong penggunaan instrumen geoekonomi sebagai alat tekanan dan pengaruh, sementara ruang siber berfungsi sebagai akselerator yang memungkinkan pencapaian tujuan geopolitik dan geoekonomi secara cepat, tersembunyi, dan berbiaya rendah.</p> <p>Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi global tidak lagi netral, melainkan sarat kepentingan politik dan keamanan. Sanksi ekonomi, pembatasan perdagangan, kontrol teknologi, dan intervensi terhadap rantai pasok strategis kerap digunakan sebagai instrumen geopolitik. Pada saat yang sama, geosiber menjadi domain utama untuk mendukung kompetisi tersebut melalui spionase digital, sabotase sistem ekonomi, pencurian data strategis, dan operasi pengaruh berbasis informasi. Integrasi ketiga dimensi ini menciptakan spektrum ancaman hibrida yang berdampak langsung terhadap stabilitas nasional dan keamanan dalam negeri.</p> <p>Bagi Indonesia dan Polri, integrasi geopolitik, geoekonomi, dan geosiber memunculkan empat tantangan eksternal utama.</p> <p>a. Meningkatnya kejahatan transnasional yang memanfaatkan ketegangan geopolitik, perbedaan rezim hukum antarnegara, serta kemajuan teknologi digital. Jaringan kejahatan terorganisir semakin adaptif dalam memanfaatkan ruang siber dan sistem</p>
--	---

	<p>ekonomi global untuk kegiatan ilegal lintas batas negara.</p> <p>b. Kerentanan ekonomi domestik terhadap fluktuasi dan tekanan ekonomi global yang dapat memicu inflasi, pengangguran, kesenjangan sosial, dan pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>c. Meningkatnya ancaman serangan dan infiltrasi siber terhadap infrastruktur kritis nasional dan lembaga negara strategis. Serangan siber tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga berpotensi melumpuhkan fungsi pelayanan publik, melemahkan sistem keamanan nasional, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Keempat, berkembangnya perang kognitif dan manipulasi informasi yang menargetkan ruang kesadaran publik. Disinformasi, propaganda digital, radikalisme daring, dan operasi pengaruh berpotensi memicu polarisasi sosial, konflik horizontal, serta delegitimasi institusi negara.</p> <p>Dalam perspektif Sespimti Polri, dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geosiber harus dipahami sebagai variabel lingkungan eksternal strategis yang membentuk tantangan keamanan nasional masa kini dan masa depan. Pimpinan Polri dituntut memiliki wawasan strategis yang komprehensif untuk membaca perubahan lingkungan global secara akurat, mengantisipasi eskalasi ancaman hibrida, serta memanfaatkan peluang kerja sama internasional dan kemajuan teknologi secara optimal. Pemahaman integratif ini menjadi landasan penting tidak hanya dalam perumusan kebijakan dan strategi kepolisian, tetapi juga dalam membangun stabilitas keamanan nasional yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berubah.</p> <p><b>B. PESTEL Pada Skala Global dan Regional</b></p> <p>Dalam era ketidakpastian global saat ini, penting bagi lembaga publik dan lembaga keamanan negara seperti Kepolisian Republik Indonesia untuk mengetahui bagaimana kondisi eksternal berubah. Analisis PESTEL: <i>Political, Economic, Social, Technological, Environmental</i>, dan <i>Legal</i> adalah kerangka analitis yang banyak digunakan untuk menilai dinamika eksternal. Ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi</p>
--	--

	<p>faktor strategis yang memengaruhi perkembangan global dan regional serta dampaknya terhadap stabilitas nasional.</p> <p>Persaingan geopolitik, integrasi ekonomi, transformasi demografi, revolusi digital, percepatan perubahan iklim, dan perkembangan hukum internasional adalah semua faktor yang memengaruhi dinamika PESTEL di seluruh dunia. Sementara pada tingkat regional, khususnya Asia Tenggara, komponen ini sangat penting untuk menentukan kemajuan ekonomi digital, interaksi sosial budaya, kerja sama kawasan, dan keamanan maritim.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Faktor Politik (<i>Political</i>)<ol style="list-style-type: none"><li>a. Konteks politik global<p>Beberapa fenomena utama yang memengaruhi dinamika politik global saat ini antara lain:</p><ol style="list-style-type: none"><li>1) Persaingan kekuatan besar (<i>great power competition</i>) adalah persaingan antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia yang memengaruhi keseimbangan dunia, membentuk blok politik, dan dapat menimbulkan konflik atau ketegangan baru. Perang dagang, persaingan teknologi, dan aktivitas militer di wilayah Indo-Pasifik menunjukkan persaingan ini.</li><li>2) Meningkatnya nasionalisme dan populisme<p>Meningkatnya nasionalisme dan populisme menyebabkan kebangkitan politik identitas di banyak negara. Ini menyebabkan proteksionisme, perubahan kebijakan luar negeri, dan ketidakstabilan politik di dalam negeri.</p></li><li>3) Konflik bersenjata dan instabilitas kawasan<p>Keamanan global dan jalur perdagangan internasional ditantang oleh konflik bersenjata dan instabilitas di wilayah Perang Ukraina–Rusia, konflik di Timur Tengah, dan ketegangan di Laut Cina Selatan.</p></li><li>4) Peran organisasi internasional<p>PBB, NATO, ASEAN, dan G20 adalah organisasi internasional yang sangat memengaruhi kerja sama keamanan, penyelesaian konflik, dan pengaturan perdagangan.</p></li></ol></li></ol></li></ol>
--	---

	<p>b. Konteks politik regional (Asia Tenggara)</p> <p>Di tingkat regional, Asia Tenggara memiliki karakteristik khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ASEAN sebagai poros stabilitas regional Dengan prinsip <i>non-interference</i> dan konsensus, ASEAN berfungsi sebagai platform kerja sama politik dan keamanan, walaupun tantangan konsensus masih muncul dalam isu Laut Cina Selatan.</li> <li>2) Isu keamanan non-tradisional Terorisme, radikalisme, migrasi ilegal, human trafficking, dan kejahatan siber menjadi perhatian utama kawasan.</li> <li>3) Peran kekuatan besar di Asia Tenggara Tiongkok, AS, Jepang, dan Australia aktif dalam diplomasi kawasan, membentuk dinamika politik yang kompleks dan multidimensional.</li> </ol> <p>c. Implikasi Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan diplomasi keamanan dan kerja sama intelijen.</li> <li>2) Penguatan peran Indonesia dalam ASEAN dan Indo-Pasifik.</li> <li>3) Membangun kesiapsiagaan terhadap dampak konflik global pada keamanan domestik.</li> </ol> <p>2. Faktor Ekonomi (<i>Economic</i>)</p> <p>a. Tren ekonomi global</p> <p>Digitalisasi, disrupsi <i>supply chain</i>, dan tekanan geopolitik telah menyebabkan perubahan besar dalam ekonomi global. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi ekonomi global saat ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) digitalisasi, disrupsi supply chain, dan tekanan geopolitik telah menyebabkan perubahan besar dalam ekonomi global. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi ekonomi global saat ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perlambatan pertumbuhan ekonomi global Banyak negara mengalami tekanan akibat krisis energi, inflasi, dan dampak pasca-pandemi.</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>b) gangguan rantai pasok global Pandemi <i>covid-19</i>, perang Ukraina, dan ketegangan geopolitik telah mengubah pola perdagangan dan distribusi logistik internasional.</p> <p>c) digitalisasi ekonomi dan <i>e-commerce</i> Teknologi digital menciptakan model ekonomi baru, meningkatkan konektivitas, sekaligus membuka ruang bagi kejahatan finansial dan penipuan daring.</p> <p>d) Integrasi ekonomi lintas kawasan Perjanjian perdagangan bebas seperti RCEP (<i>regional comprehensive economic partnership</i>) mendorong perdagangan intra-Asia dengan skala besar.</p> <p>b. Tren ekonomi regional Di Asia Tenggara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ASEAN sebagai pusat pertumbuhan global Kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di dunia setelah Asia Selatan.</li> <li>2) investasi asing meningkat tajam Pabrikasi global beralih dari Tiongkok ke ASEAN (fenomena China+1 Strategy).</li> <li>3) ketimpangan ekonomi antarnegara Perbedaan tingkat pembangunan menghadirkan tantangan dalam integrasi ekonomi.</li> </ol> <p>c. implikasi strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penguatan pengawasan terhadap kejahatan keuangan dan perdagangan ilegal.</li> <li>2) membangun ketahanan pangan, energi, dan logistik nasional.</li> <li>3) adaptasi terhadap ekonomi digital dan industri masa depan.</li> </ol> <p>3. Faktor Sosial (<i>Social</i>)</p> <p>a. Tren sosial global Dinamika yang signifikan terjadi pada komponen sosial di seluruh dunia:</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) urbanisasi cepat Diperkirakan lebih dari 68% populasi global tinggal di perkotaan pada 2050.</li> <li>2) migrasi internasional Konflik, bencana, dan tekanan ekonomi mendorong arus migrasi lintas negara.</li> <li>3) kesenjangan sosial meningkat Pola distribusi pendapatan yang tidak merata memicu instabilitas sosial.</li> <li>4) perubahan nilai dan budaya global Globalisasi mempercepat pertukaran budaya, namun juga memunculkan konflik identitas.</li> <li>5) ancaman radikalisme dan ekstremisme berbasis identitas Media sosial mempermudah penyebaran ideologi ekstrem.</li> </ol> <p>b. Tren sosial regional Di kawasan Asia Tenggara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) demografi muda (<i>youth bulge</i>) Populasi usia produktif yang besar merupakan peluang, tetapi juga dapat menjadi risiko sosial.</li> <li>2) meningkatnya mobilitas lintas negara Tenaga kerja migran, wisatawan, dan pelajar internasional terus meningkat.</li> <li>3) tantangan integrasi budaya Keberagaman budaya memerlukan ruang toleransi yang kuat.</li> </ol> <p>c. Implikasi strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perlunya manajemen isu sosial, intoleransi, dan radikalisme.</li> <li>2) pemanfaatan bonus demografi melalui kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan.</li> <li>3) penguatan komunikasi publik, literasi digital, dan moderasi beragama.</li> </ol> <p>4. Faktor Teknologi (<i>Technological</i>)</p> <p>a. Perkembangan teknologi global</p>
--	--

	<p>Teknologi adalah faktor yang berkembang paling cepat. Beberapa tren utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>artificial intelligence</i> dan otomatisasi AI mengubah pola kerja, keamanan, ekonomi, serta penegakan hukum.</li> <li>2) <i>Internet of Things (IoT)</i> Konektivitas massal membuka peluang efisiensi namun meningkatkan kerentanan keamanan.</li> <li>3) big data dan analitik prediktif Digunakan untuk intelijen, kesehatan, transportasi, dan keamanan.</li> <li>4) <i>cybersecurity dan cyber threat</i> Kejahatan siber meningkat eksponensial di seluruh dunia.</li> <li>5) <i>metaverse, blockchain, dan web 3.0</i> Melahirkan sektor ekonomi digital, tetapi juga risiko pencucian uang dan kriminalitas baru.</li> </ol> <p>b. Perkembangan teknologi regional Di Asia Tenggara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) transformasi digital masif <i>E-commerce, fintech, dan platform</i> digital berkembang sangat cepat.</li> <li>2) digitalisasi pemerintahan (<i>e-government</i>) Banyak negara meningkatkan sistem administrasi berbasis digital.</li> <li>3) serangan siber regional meningkat Asia Tenggara menjadi target utama <i>phishing</i> dan <i>ransomware</i>.</li> </ol> <p>c. Implikasi Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penguatan keamanan siber nasional.</li> <li>2) pemanfaatan teknologi <i>policing: smart city, predictive policing, big data policing</i>.</li> <li>3) pengembangan literasi digital aparat dan masyarakat.</li> </ol> <p>5. Faktor Lingkungan (<i>environmental</i>)</p> <p>a. Tantangan lingkungan global</p>
--	--

	<p>Isu lingkungan menjadi salah satu tantangan terbesar abad ke-21:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perubahan iklim global Meningkatnya suhu bumi memicu cuaca ekstrem dan krisis ekologi.</li> <li>2) bencana alam berskala besar Banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan meningkat signifikan.</li> <li>3) sumber daya alam menipis Eksplorasi berlebihan mengancam ketahanan pangan dan air.</li> <li>4) polusi dan kerusakan ekosistem Urbanisasi dan industrialisasi memperburuk polusi udara, tanah, dan laut.</li> </ol> <p>b. Isu lingkungan regional Di Asia Tenggara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bencana alam tinggi Indonesia berada di <i>ring of fire</i>, rentan terhadap gempa dan tsunami.</li> <li>2) kebakaran hutan dan kabut asap Menjadi isu lintas negara.</li> <li>3) krisis air dan kerusakan lingkungan perkotaan Mempengaruhi kesehatan dan ekonomi masyarakat.</li> </ol> <p>c. Implikasi strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penguatan manajemen bencana dan ketahanan iklim.</li> <li>2) kerja sama lingkungan lintas negara.</li> <li>3) pengawasan terhadap kejahatan lingkungan (<i>illegal logging, illegal fishing</i>).</li> </ol> <p>6. Faktor Legal</p> <p>a. Perkembangan kerangka hukum global Hukum internasional mengatur interaksi antarnegara dalam perdagangan, keamanan, dan HAM. Tren utama:</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) harmonisasi regulasi global Termasuk standar keuangan, data <i>protection</i>, dan <i>cybersecurity</i>.</li> <li>2) perjanjian internasional dan regional Dari hukum laut hingga penegakan hukum transnasional.</li> <li>3) evolusi hukum siber Negara-negara memperketat pengaturan terkait keamanan siber dan privasi data.</li> </ol> <p>b. Kerangka hukum regional Dalam ASEAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>mutual legal assistance treaty</i> (MLAT) Memfasilitasi kerja sama penegakan hukum lintas negara.</li> <li>2) <i>ASEAN Convention Against Terrorism</i> (ACAT) Mengatur kolaborasi melawan terorisme.</li> <li>3) AFTA dan RCEP Mengatur perdagangan bebas kawasan.</li> </ol> <p>c. Implikasi strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penguatan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional.</li> <li>2) kolaborasi penegakan hukum regional.</li> <li>3) pembaruan regulasi siber dan privasi data.</li> </ol> <p><b>C. Analisis SWOT Makro Untuk Menilai Posisi Institusi dalam Lingkungan Strategis</b></p> <p>Analisis SWOT Makro merupakan instrumen analisis strategis yang digunakan untuk menilai posisi dan kesiapan suatu institusi dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal pada tingkat makro. Fokus utama SWOT Makro adalah pada faktor-faktor eksternal berskala luas—politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan regulasi—yang membentuk konteks strategis organisasi dan berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi institusi.</p> <p>Dalam kerangka pendidikan Sespimti Polri, SWOT Makro menjadi alat penting untuk melatih pola pikir strategis perwira tinggi Polri dalam membaca perubahan lingkungan global, regional, dan nasional. Dinamika geopolitik, geoekonomi, dan</p>
--	---

geosiber yang berkembang cepat menuntut pimpinan Polri tidak hanya bersikap reaktif terhadap gangguan keamanan, tetapi mampu melakukan antisipasi strategis berbasis analisis lingkungan. SWOT Makro membantu peserta Sespimti memahami bagaimana faktor eksternal tersebut dapat berkembang menjadi peluang atau ancaman yang memengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri.

Bagi Polri sebagai institusi penegak hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, hasil analisis SWOT Makro menjadi dasar dalam perumusan kebijakan strategis, penentuan prioritas program, serta pengembangan kapasitas organisasi. Perubahan regulasi, kemajuan teknologi digital, tekanan ekonomi global, serta ekspektasi publik terhadap profesionalisme dan akuntabilitas Polri merupakan faktor eksternal yang harus direspons secara terintegrasi. Melalui SWOT Makro, pimpinan Polri dilatih untuk mengaitkan dinamika lingkungan strategis dengan kebutuhan transformasi organisasi dan inovasi pelayanan kepolisian.

Dalam konteks kepemimpinan Sespimti, penguasaan SWOT Makro tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan visioner. Peserta didik diharapkan mampu menggunakan hasil analisis SWOT Makro sebagai dasar pengambilan keputusan strategis tingkat nasional, membangun sinergi lintas sektor, serta memastikan kesiapan Polri menghadapi tantangan keamanan abad ke-21. Dengan demikian, SWOT Makro berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman lingkungan strategis dan praktik kepemimpinan strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional secara berkelanjutan.

#### Komponen SWOT Makro

##### 1. *Strengths* (Kekuatan) – Eksternal yang Mendukung

Kekuatan pada level makro mencakup kondisi eksternal yang mendukung eksistensi institusi, misalnya:

- a. Stabilitas politik yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan keamanan berjalan efektif.
- b. Dukungan teknologi nasional untuk meningkatkan kapasitas operasional.

##### 2. *Weaknesses* (Kelemahan) – Hambatan Eksternal

Kelemahan makro adalah faktor eksternal yang menghambat efektivitas institusi, seperti:

- a. Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat.

	<p>b. Tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata sehingga memengaruhi efektivitas program digital policing.</p> <p>3. <i>Opportunities</i> (Peluang) – Tren Eksternal yang Positif Peluang berasal dari perubahan lingkungan yang membuka ruang penguatan institusi:</p> <p>a. Perkembangan teknologi AI dan big data yang dapat memperkuat intelijen kepolisian.</p> <p>b. Kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara.</p> <p>4. <i>Threats</i> (Ancaman) – Risiko Strategis Eksternal Ancaman makro mencakup dinamika besar yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kapasitas institusi:</p> <p>a. Ancaman kejahatan siber, disinformasi, dan kriminalitas digital.</p> <p>b. Ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi prioritas kebijakan nasional.</p> <p><b>D. Metode <i>Strategic Foresight</i> Untuk Memproyeksikan Ancaman dan Peluang 10-20 Tahun ke Depan</b></p> <p><i>Strategic Foresight</i> adalah pendekatan sistematis untuk "memandang ke depan", yaitu mempelajari masa depan yang mungkin, bukan sekadar meramalkan satu masa depan. <i>Foresight</i> membantu individu, organisasi, atau pemerintah memahami faktor-faktor penting yang dapat membentuk berbagai masa depan, dan kemudian membuat strategi untuk menangani peluang dan ancaman.</p> <p><i>Foresight</i> bukan prediksi mutlak, sebaliknya berdasarkan tren, sinyal, dan ketidakpastian, ia menawarkan cerita alternatif (<i>scenarios</i>). Tujuan utamanya adalah untuk menjadi lebih siap untuk menghadapi kemungkinan masa depan dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan situasi saat ini.</p> <p>1. <i>Scanning</i></p> <p>a. proses untuk menemukan "sinyal awal", tren, dan perubahan yang terjadi di lingkungan luar. Ini dapat berupa perubahan dalam bidang teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, antara lain.</p> <p>b. Pengamatan tren, penelitian literatur, pengamatan indikator, dan mendengarkan "isu marginal" yang</p>
--	---

	<p>belum umum adalah beberapa teknik yang dapat digunakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <i>Forecasting</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan hasil <i>scanning</i> + data/tren sekarang, <i>forecasting</i> mencoba memperkirakan bagaimana perkembangan tersebut dapat berlanjut — atau berubah — di masa depan. Ini bisa bersifat kuantitatif (misalnya proyeksi angka) maupun kualitatif (narasi kemungkinan).</li> <li>b. Dalam konteks <i>foresight</i>, <i>forecasting</i> sering digunakan untuk membuat berbagai scenario masa depan yang mungkin terjadi, daripada satu masa depan "pasti".</li> </ol> </li> <li>3. <i>Visioning (Visioning and Backcasting)</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah memahami berbagai kemungkinan masa depan, <i>visioning</i> adalah proses merancang "masa depan yang diinginkan" — visi ideal yang ingin dicapai.</li> <li>b. Kemudian, dengan metode seperti <i>backcasting</i>, kita "mundur ke masa sekarang": menentukan langkah-langkah strategis apa yang perlu diambil sekarang agar visi itu bisa terwujud.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>E. Isu-isu Strategis yang Berpotensi Mengubah Lanskap Keamanan Nasional</b></p> <p>Istilah "isu strategis" mengacu pada dinamika yang terjadi di tingkat global, regional, maupun domestik yang memiliki potensi untuk memengaruhi stabilitas, ketahanan, dan arah kebijakan keamanan nasional suatu negara. Perubahan ini sering terjadi secara tidak teratur, cepat, dan sulit diprediksi, sehingga diperlukan kemampuan untuk antisipasi strategis, memodifikasi kebijakan, dan bersiap-siap.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Disruptive Technology</i> (Teknologi Disruptif) <p>Teknologi disruptif merujuk pada inovasi yang mengubah tatanan lama secara fundamental, menciptakan peluang baru, sekaligus menghadirkan risiko signifikan terhadap keamanan. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), <i>big data analytics</i>, <i>autonomous systems</i>, <i>bioteknologi</i>, <i>quantum computing</i>, dan teknologi siber dapat memperluas kapasitas negara, tetapi juga membuka celah bagi aktor non-negara, kejahatan lintas negara, dan ancaman hibrida.</p> <p>Dalam konteks keamanan nasional, teknologi disruptif dapat:</p> </li> </ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengubah metode operasi intelijen, pertahanan, dan penegakan hukum.</li><li>b. Memunculkan ancaman baru seperti AI-driven <i>cyberattacks</i>, <i>deepfake politik</i>, <i>autonomous weapons</i>, dan serangan infrastruktur kritis.</li><li>c. Menggeser keunggulan strategis antarnegara yang mampu menguasai teknologi baru.</li></ul> <p>2. Pergeseran Aliansi dan Arsitektur Global</p> <p>Pergeseran aliansi global menjadi faktor strategis lain yang memengaruhi stabilitas keamanan. Rivalitas antara kekuatan besar dan munculnya koalisi-koalisi baru seperti BRICS+, QUAD, maupun penguatan komitmen Indo-Pasifik, menyebabkan arsitektur keamanan dunia menjadi semakin cair dan sulit diprediksi. Perubahan peta aliansi ini dapat berdampak langsung terhadap kebijakan pertahanan, diplomasi keamanan, dan hubungan Indonesia dengan aktor internasional, khususnya dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.</p> <p>Dengan memahami kedua isu strategis tersebut, institusi keamanan nasional diharapkan mampu merumuskan kebijakan antisipatif yang adaptif, memperkuat kerja sama internasional, serta membangun kapabilitas teknologi dan sumber daya manusia yang relevan. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menghadapi ancaman dan peluang pada era transformasi geopolitik dan teknologi global.</p>
--	---

**POKOK BAHASAN 2**  
**KOMPONEN DAN HUBUNGAN**  
**ANTAR-SUBSISTEM DALAM**  
**SISTEM KEAMANAN NASIONAL**  
**SERTA PERAN KUNCI POLRI DI DALAMNYA**

**A. Sistem Keamanan Nasional dan membedakannya dari Sistem Pertahanan Negara**

1. Konsep Sistem Keamanan Nasional

Siskamnas merupakan suatu tatanan yang mengatur penyelenggaraan keamanan dalam negeri secara terpadu, melibatkan berbagai komponen negara seperti Polri, instansi pemerintah pusat/daerah, serta partisipasi masyarakat. Siskamnas berfokus pada upaya menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, termasuk penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban masyarakat, pencegahan kejahatan, penanggulangan bencana sosial, dan mitigasi ancaman non-militer seperti terorisme, kriminalitas, ekstremisme, serta gangguan siber.

Siskamnas pada dasarnya adalah arsitektur keamanan nasional yang berbasis *civil security*, yaitu keamanan yang dikembangkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan sipil dengan Polri sebagai *leading sector*. Ruang lingkupnya fleksibel, dinamis, dan harus mampu mengantisipasi ancaman kompleks yang berkembang di lingkungan domestik.

Ciri-ciri Siskamnas:

- a. Fokus pada keamanan dalam negeri.
- b. Mengutamakan penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas.
- c. Melibatkan multi-aktor: Polri, K/L, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
- d. Penanganan ancaman bersifat non-militer, asimetris, dan multidimensional.
- e. Mengedepankan pendekatan preventif–detektif–responsif.
- f. Basis legalitas: UU No. 2/2002 tentang Kepolisian, UU No. 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya

	<p>Nasional (aspek non-militer), serta berbagai regulasi turunan.</p> <p>2. Konsep Sistem Pertahanan Negara</p> <p>Sistem Pertahanan Negara merupakan tatanan pertahanan yang bertujuan melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer maupun ancaman hibrida yang mengarah pada agresi atau bentuk lain yang mengancam eksistensi negara.</p> <p>Pertahanan negara bersifat militaristik dalam struktur, strategis dalam orientasi, dan defensif aktif dalam prinsip. TNI memegang peran utama, sedangkan rakyat menjadi komponen pendukung sesuai konsep pertahanan semesta.</p> <p>Ciri-ciri Sistem Pertahanan Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fokus pada ancaman militer dan ancaman yang setara.</li> <li>b. TNI sebagai komponen utama.</li> <li>c. Orientasi jangka panjang dan strategis.</li> <li>d. Bersifat siap tempur, terstruktur, hirarkis.</li> <li>e. Diatur oleh UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara.</li> </ol> <p>Dengan demikian, Siskamnas dan Sistem Pertahanan Negara memiliki mandat institusional, ruang lingkup, dan orientasi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga keberlangsungan negara. Keduanya membentuk arsitektur keamanan dan pertahanan nasional yang terpadu dalam menghadapi spektrum ancaman kontemporer.</p> <p><b>B. Pilar-pilar Siskamnas</b></p> <p>1. Keamanan Dalam Negeri</p> <p>Keamanan dalam negeri merupakan pilar utama dalam Siskamnas yang berfungsi menjaga stabilitas sosial, politik, dan ketertiban masyarakat di dalam wilayah negara. Pilar ini mencakup pemeliharaan ketertiban umum, penanggulangan kriminalitas, mitigasi konflik sosial, perlindungan masyarakat, serta respons terhadap ancaman domestik seperti terorisme, radikalisme, tindak pidana terorganisasi, dan bencana.</p> <p>Peran utama pilar ini berada pada institusi penegak hukum, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat melalui partisipasi keamanan komunitas.</p>
--	--

	<p>2. Keamanan Laut</p> <p>“Keamanan Laut berperan memastikan terjaganya kedaulatan dan stabilitas wilayah maritim Indonesia melalui pengawasan jalur pelayaran, pencegahan IUUF, penegakan hukum di laut, serta perlindungan aset-aset strategis maritim sebagai bagian integral dari keamanan nasional.”</p> <p>3. Keamanan Siber</p> <p>“Keamanan Siber berfungsi melindungi infrastruktur teknologi nasional dari ancaman digital melalui peningkatan ketahanan jaringan, penguatan sistem deteksi dini, penanganan insiden siber, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sistem elektronik negara.”</p> <p>4. Keamanan Informasi</p> <p>“Keamanan Informasi memastikan perlindungan informasi strategis negara dengan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya, serta memperkuat tata kelola informasi untuk mencegah kebocoran data, disinformasi, dan ancaman manipulasi informasi yang dapat mengganggu keamanan nasional.”</p> <p>Keempat pilar Siskamnas merupakan elemen terpadu yang bekerja secara sinergis dalam melindungi kedaulatan, stabilitas, serta keberlangsungan pembangunan nasional. Integrasi antar pilar menjadi kunci dalam membangun arsitektur keamanan nasional yang adaptif terhadap ancaman konvensional maupun non-konvensional.</p> <p><b>C. Dasar Hukum Dan Regulasi Yang Mengatur Siskamnas</b></p> <p>Siskamnas di Indonesia berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur peran, tugas, kewenangan, serta koordinasi antar lembaga keamanan negara. Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan keamanan nasional yang terintegrasi, mencakup aspek pertahanan, penegakan hukum, intelijen, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.</p> <p>Regulasi Siskamnas tidak diatur dalam satu undang-undang khusus, tetapi merupakan kerangka hukum komprehensif yang terdiri dari sejumlah undang-undang terkait. Setiap regulasi memberikan mandat tertentu bagi institusi negara sesuai fungsi dan karakteristik ancaman yang dihadapi.</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Keamanan Nasional Indonesia dibangun di atas kerangka regulasi yang saling terintegrasi, yang dimulai dari UUD 1945 sebagai dasar konstitusional hingga berbagai undang-undang sektoral yang mengatur peran institusi keamanan negara.”</li> <li>2. “UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pilar utama penyelenggaraan keamanan dalam negeri, yang menugaskan Polri sebagai institusi yang memelihara kamtibmas serta menegakkan hukum.”</li> <li>3. “Perbedaan mendasar antara fungsi pertahanan dan keamanan ditegaskan dalam UU Pertahanan Negara dan UU TNI, yang menetapkan TNI sebagai unsur pertahanan, namun tetap dapat mendukung keamanan nasional melalui operasi OMSP.”</li> <li>4. “UU Intelijen Negara memberikan dasar hukum yang kuat bagi kegiatan deteksi dini dan peringatan dini, sehingga memungkinkan negara mengantisipasi ancaman yang bersifat laten, non-tradisional, maupun strategis.”</li> <li>5. “Dalam konteks ancaman modern seperti terorisme dan serangan siber, kehadiran UU Terorisme dan Perpres tentang BSSN menjadi bagian integral yang memperkuat ketahanan nasional di ranah fisik maupun digital.”</li> <li>6. “Keseluruhan regulasi ini membentuk ekosistem hukum yang memastikan bahwa penyelenggaraan Siskamnas tidak hanya reaktif terhadap ancaman, tetapi juga proaktif, terkoordinasi, dan sesuai dengan prinsip negara hukum”.</li> </ol> <p><b>D. Manajemen Sinergi Antar-Subsistem Keamanan</b></p> <p>Manajemen Sinergi Antar-Subsistem Keamanan merupakan kerangka integratif yang bertujuan menyatukan peran, fungsi, dan kapasitas lembaga-lembaga keamanan agar tercipta koordinasi yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, merespons, serta memulihkan kondisi dari setiap bentuk ancaman yang bersifat kompleks dan lintas-sektor.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan Sinergi Antar-Subsistem Keamanan</li> </ol> <p>Tujuan utama sinergi antar-subsistem keamanan adalah menciptakan integrasi operasional yang memungkinkan institusi keamanan bergerak secara simultan, saling mendukung, dan memaksimalkan sumber daya nasional dalam rangka menjaga stabilitas keamanan negara.</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. <b>Subsistem yang Perlu Bersinergi</b><p>Sistem keamanan nasional terdiri dari berbagai subsistem yang bila bekerja sendiri-sendiri akan menghasilkan respons parsial, namun ketika dikelola secara terpadu akan menciptakan kekuatan kolektif yang jauh lebih besar.</p><p>Sinergi diperlukan karena setiap subsistem memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing; oleh sebab itu integrasi kapasitas antarlembaga menjadi kunci untuk mewujudkan keamanan nasional yang adaptif dan tangguh.</p></li><li>3. <b>Prinsip-Prinsip Manajemen Sinergi</b><p>Prinsip-prinsip sinergi menuntut adanya koordinasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga operasional, sehingga setiap subsistem dapat berinteraksi melalui prosedur yang kompatibel dan saling mendukung dalam setiap operasi keamanan.</p></li><li>4. <b>Mekanisme Implementasi Sinergi</b><p>Implementasi sinergi menuntut adanya kerangka kerja yang memadukan kebijakan, operasi, teknologi informasi, dan pengembangan SDM agar setiap institusi mampu bekerja dalam satu sistem keamanan nasional yang kohesif.</p></li><li>5. <b>Tantangan Sinergi Antar-Subsistem Keamanan</b><p>Berbagai tantangan seperti ego sektoral, kesenjangan teknologi, dan perbedaan standar operasional perlu dikelola secara strategis agar sinergi dapat berjalan optimal dan tidak terhambat oleh konflik kewenangan.”</p></li><li>6. <b>Model Sinergi yang Direkomendasikan</b><p>Model sinergi seperti pendekatan whole-of-government dan fusion center telah terbukti efektif dalam mengintegrasikan informasi, sehingga memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan keamanan yang lebih cepat dan akurat.</p></li></ol>
--	---

**POKOK BAHASAN 3**  
**PERUMUSAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN**  
**DI TINGKAT NASIONAL YANG ADAPTIF,**  
**KOMPREHENSIF, DAN BERBASIS**  
**ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS**

**A. Siklus Kebijakan Keamanan Nasional**

1. Pengertian

Siklus kebijakan keamanan nasional adalah rangkaian prosedur sistematis yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi, merumuskan, melaksanakan, dan menilai kebijakan yang berkaitan dengan melindungi negara dari berbagai ancaman. Siklus ini melibatkan banyak pihak di Indonesia, seperti Polisi, TNI, Badan Intelijen Negara, Kemenko Polhukam, dan lembaga keamanan lainnya. Kebijakan yang dibuat harus responsif, adaptif, dan tahan terhadap ancaman tradisional dan non-tradisional melalui proses siklus ini.

2. Tahapan Siklus Kebijakan Keamanan Nasional

a. Agenda setting (penetapan agenda)

Agenda setting dalam kebijakan keamanan nasional merupakan proses identifikasi dan seleksi isu-isu keamanan yang dinilai memiliki urgensi strategis bagi stabilitas nasional. Pada tahap ini, pemerintah menggunakan informasi intelijen, hasil analisis lingkungan strategis, serta tekanan publik untuk menentukan prioritas masalah yang harus segera ditangani, seperti ancaman terorisme, kejahatan siber, instabilitas politik, atau konflik sosial.”

b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)

Formulasi kebijakan keamanan nasional dilakukan melalui perumusan alternatif solusi, analisis risiko, dan penentuan strategi terbaik untuk menjawab masalah yang telah masuk ke agenda nasional. Tahap ini mengintegrasikan masukan intelijen, koordinasi antar kementerian/lembaga, kajian akademik, serta pertimbangan politik untuk menghasilkan kebijakan yang feasible, efektif, dan akuntabel.

	<p>c. Implementasi kebijakan</p> <p>Implementasi kebijakan keamanan nasional mencakup pelaksanaan strategi dan program yang telah dirumuskan, seperti operasi keamanan, penegakan hukum, penguatan intelijen, atau kampanye keamanan publik. Pelaksanaan ini memerlukan koordinasi lintas-instansi, pengawasan komando, serta efektivitas alokasi sumber daya agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten di lapangan.</p> <p>d. Evaluasi kebijakan</p> <p>Evaluasi kebijakan keamanan nasional bertujuan mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan, menilai pencapaian tujuan strategis, dan menentukan apakah kebijakan harus dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan. Proses evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, audit kebijakan, indikator kinerja, serta analisis dampak, sehingga menghasilkan feedback yang memperkuat siklus kebijakan berikutnya.</p> <p><b>B. Model Rational-Comprehensive dan Incremental Policy Making Dalam Konteks Keamanan</b></p> <p>Dalam proses perumusan kebijakan keamanan, pembuat kebijakan membutuhkan pendekatan analitis untuk memastikan keputusan yang diambil efektif, proporsional, dan dapat diterapkan. Dua model yang paling berpengaruh dalam studi kebijakan publik adalah Rational-Comprehensive Model dan Incremental Model. Keduanya memberikan cara pandang yang berbeda mengenai bagaimana kebijakan seharusnya dirumuskan, terutama dalam isu-isu keamanan yang kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian.</p> <p>1. Model <i>Rational-Comprehensive</i> dalam Kebijakan Keamanan</p> <p>a. Konsep dasar</p> <p><i>Model Rational-Comprehensive</i> (juga dikenal sebagai <i>root method</i>) berangkat dari prinsip bahwa kebijakan harus disusun melalui proses analisis yang menyeluruh, sistematis, dan berdasarkan data yang lengkap. Model ini mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan mampu:</p> <p>1) Mengidentifikasi seluruh masalah secara komprehensif.</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Menyusun seluruh alternatif solusi.</li> <li>3) Menganalisis konsekuensi dari masing-masing alternatif.</li> <li>4) Memilih opsi terbaik dengan rasionalitas maksimal.</li> </ol> <p>Model ini lazim digunakan dalam perencanaan keamanan jangka panjang, penyusunan strategi nasional, dan kebijakan dengan dampak strategis tinggi seperti sistem keamanan siber, pertahanan dalam negeri, dan manajemen krisis nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Karakteristik utama       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berorientasi pada tujuan strategis.</li> <li>2) Menggunakan data, intelijen, dan bukti ilmiah secara maksimal.</li> <li>3) Berbasis analisis <i>cost-benefit</i>.</li> <li>4) Bersifat terencana dan <i>top-down</i>.</li> <li>5) Cocok untuk isu keamanan yang memerlukan pendekatan sistemik (misalnya: pertahanan siber, pengamanan perbatasan, reformasi sektor keamanan).</li> </ol> </li> <li>c. Contoh dalam konteks keamanan       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Strategi Keamanan Nasional (<i>National Security Strategy</i>).</li> <li>2) Perencanaan Modernisasi Alutsista dan Sistem Komando.</li> <li>3) Desain Arsitektur Keamanan Siber Nasional.</li> </ol> </li> </ol> <p>2. Model Incremental dalam Kebijakan Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsep dasar       <p>Model Incremental (juga dikenal sebagai <i>successive limited comparisons</i> atau <i>muddling through</i>) berangkat dari gagasan bahwa kebijakan publik sering kali tidak dapat dirumuskan secara komprehensif karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informasi tidak lengkap.</li> <li>2) Sumber daya terbatas.</li> <li>3) Lingkungan politik sangat dinamis.</li> <li>4) Waktu pengambilan keputusan terbatas.</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>5) Kompleksitas ancaman keamanan sangat tinggi. Karena itu, perubahan kebijakan dilakukan secara bertahap melalui penyesuaian kecil dan pragmatis, bukan melalui perombakan besar.</p> <p>b. Karakteristik utama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berbasis pengalaman dan kebijakan yang sudah ada.</li> <li>2) Perubahan dilakukan secara bertahap (incremental).</li> <li>3) Mengutamakan konsensus politik.</li> <li>4) Lebih realistis dalam kondisi ketidakpastian tinggi.</li> <li>5) Efektif untuk isu keamanan operasional dan taktis.</li> </ol> <p>c. Contoh dalam konteks keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyesuaian SOP penanganan kejahatan transnasional.</li> <li>2) Peningkatan bertahap kapasitas siber kepolisian.</li> <li>3) Penambahan pos keamanan di wilayah rawan.</li> <li>4) Revisi regulasi keamanan secara periodik menyesuaikan ancaman.</li> </ol> <p><b>C. Kebijakan Keamanan Adaptif yang Fleksibel Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis yang Cepat</b></p> <p>Kebijakan keamanan adaptif merupakan pendekatan pengelolaan keamanan yang menekankan fleksibilitas, kecepatan penyesuaian, dan kemampuan institusi untuk merespons dinamika ancaman yang terus berubah. Melalui mekanisme pemantauan berkelanjutan dan pembaruan strategi secara <i>real-time</i>, kebijakan ini memastikan aparat keamanan tetap relevan dan efektif menghadapi ketidakpastian lingkungan strategis</p> <p>1. Ciri-ciri Utama Kebijakan Keamanan Adaptif</p> <p>a. Responsif terhadap perubahan cepat</p> <p>Mengutamakan kemampuan mendeteksi sinyal perubahan sejak dini melalui intelijen strategis dan <i>environmental scanning</i>.</p>
--	--

	<p>b. <b>Fleksibel dalam implementasi</b> Menyediakan ruang improvisasi bagi pelaksana lapangan tanpa mengesampingkan kerangka regulatif.</p> <p>c. <b>Berbasis data dan analitik prediktif</b> Penggunaan big data, AI, dan analisis tren untuk memprediksi ancaman.</p> <p>d. <b>Memiliki siklus evaluasi yang pendek</b> Tidak menunggu akhir tahun, evaluasi dilakukan berkala bahkan harian/<i>real-time</i>.</p> <p>e. <b>Mendorong kolaborasi multi-aktor</b> Mengintegrasikan TNI, Polri, BSSN, BNPT, Kemenhan, pemerintah daerah, serta sektor privat.</p> <p>2. <b>Pentingnya Adaptivitas dalam Lingkungan Strategis yang Cepat Berubah</b> Di tengah percepatan perubahan lingkungan strategis, institusi keamanan dituntut memiliki adaptivitas tinggi agar mampu merespons ancaman yang muncul secara mendadak. Kebijakan yang fleksibel memungkinkan aparat keamanan memperbarui strategi dan sumber daya secara cepat sehingga tidak tertinggal oleh dinamika geopolitik, teknologi, maupun perubahan sosial.</p> <p>3. <b>Model Implementasi Kebijakan Keamanan Adaptif</b></p> <p>a. <i>Adaptive planning and scenario-based policy</i> Penyusunan rencana berdasar skenario multi-opsi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.</p> <p>b. <i>Dynamic risk assessment</i> Penilaian risiko dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya pada awal operasi.</p> <p>c. <i>Real-time information integration</i> Sistem komando yang mampu menggabungkan informasi intelijen, data publik, dan sensor teknologi.</p> <p>d. <i>Continuous learning and after action review (AAR)</i> Pembelajaran cepat dari insiden untuk segera memperbaiki prosedur.</p>
--	---

	<p>4. Contoh Penerapan dalam Konteks Kepolisian dan Keamanan Nasional</p> <p>Dalam konteks kepolisian, kebijakan adaptif tercermin dari penggunaan <i>predictive policing</i>, penyesuaian strategi operasi menghadapi ancaman digital, serta koordinasi lintas lembaga dalam merespons serangan siber. Pendekatan ini memastikan respons keamanan tetap cepat, presisi, dan sesuai kebutuhan di lapangan.</p> <p><b>D. Rencana Kontinjensi Strategis (<i>Contingency Planning</i>) Untuk Skenario Ancaman <i>High-Impact Dan Low-Probability</i></b></p> <p>Rencana Kontinjensi Strategis (<i>Contingency Planning</i>) adalah proses perencanaan yang disusun untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dengan menyiapkan langkah-langkah antisipatif, respons, dan pemulihan terhadap berbagai skenario ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas organisasi maupun keamanan nasional.</p> <p>Dalam konteks keamanan nasional, <i>contingency planning</i> diperlukan untuk mengantisipasi ancaman <i>high-impact and low-probability</i> (HILP), yaitu ancaman yang kemungkinan terjadinya kecil, tetapi jika terjadi, dampaknya sangat besar dan dapat melumpuhkan sistem keamanan, ekonomi, maupun infrastruktur negara.</p> <p>1. Karakteristik Ancaman HILP</p> <p>Ancaman HILP memiliki ciri-ciri sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Probabilitas rendah, sering kali tidak terdeteksi oleh sistem pemantauan rutin.</li> <li>b. Dampak sangat besar, dapat menyebabkan kerusakan sistemik pada level nasional.</li> <li>c. Sifatnya non-linear, sehingga dampak yang muncul tidak sebanding dengan pemicu awal.</li> <li>d. Mengandung ketidakpastian tinggi, sulit diprediksi waktu dan lokasi kejadiannya.</li> <li>e. Butuh intervensi lintas lembaga, karena dampaknya meluas ke banyak sektor.</li> </ol> <p>Contoh ancaman HILP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Serangan siber masif pada infrastruktur kritis.</li> <li>b. Gempa besar/megamendung yang jarang terjadi.</li> <li>c. Pandemi baru dengan tingkat mortalitas tinggi.</li> </ol>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Kegagalan jaringan listrik nasional (<i>blackout total</i>).</li> <li>e. Serangan terorisme dengan senjata biologis.</li> <li>f. Eskalasi konflik regional secara tiba-tiba.</li> </ul> <p>2. Pentingnya <i>Contingency Planning</i> untuk Ancaman HILP</p> <p>Dalam kerangka manajemen keamanan nasional, <i>contingency planning</i> memiliki nilai strategis untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengurangi ketidaksiapan institusi saat ancaman ekstrem terjadi.</li> <li>b. Mencegah disrupsi total terhadap layanan publik esensial.</li> <li>c. Membantu pengambilan keputusan cepat melalui skenario dan panduan respons siap pakai.</li> <li>d. Meningkatkan koordinasi antar-instansi melalui role assignment yang jelas.</li> <li>e. Meningkatkan resiliensi nasional terhadap peristiwa yang bersifat "<i>game-changing</i>".</li> </ul> <p>3. Tahapan Penyusunan Rencana Kontinjensi Strategis (<i>Contingency Planning Cycle</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi ancaman HILP <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menggunakan metode <i>foresight: scanning, scenario building, wargaming</i>.</li> <li>2) Menilai ancaman dengan risiko ekstrem dan ketidakpastian tinggi.</li> <li>3) Menentukan prioritas berdasarkan dampak strategis, bukan probabilitas</li> </ul> </li> <li>b. Analisis dampak strategis <p>Menilai potensi kerusakan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Infrastruktur kritis.</li> <li>2) Sistem keamanan.</li> <li>3) Stabilitas politik dan sosial.</li> <li>4) Ekonomi dan rantai pasok.</li> <li>5) Menggunakan <i>stress test, impact mapping, dan cascade effect analysis</i>.</li> </ul> </li> <li>c. Pengembangan skenario kontinjensi <p>Membuat beberapa skenario, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Worst-case scenario</i>.</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) <i>Most plausible extreme scenario.</i></li> <li>3) <i>Secondary triggered scenario</i> (efek domino).</li> <li>4) Skenario harus dinarasikan secara detail untuk memandu latihan dan simulasi.</li> </ol> <p>d. Perumusan rencana respons</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Struktur komando darurat.</li> <li>2) Aktivasi pusat krisis.</li> <li>3) Protokol komunikasi publik.</li> <li>4) Mekanisme koordinasi lintas sektor (Polri, TNI, BNPB, Kominfo, Kemenkes).</li> <li>5) SOP evakuasi dan pemulihan.</li> </ol> <p>e. Penetapan kapasitas cadangan</p> <p>Kapasitas cadangan yang dibangun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Logistik darurat (BBM, pangan, obat-obatan).</li> <li>2) Backup data dan jaringan komunikasi.</li> <li>3) <i>Mobile command center.</i></li> <li>4) Cadangan personel dan rotasi tugas.</li> <li>5) Redundansi infrastruktur.</li> </ol> <p>f. Simulasi dan latihan (<i>drills and tabletop exercise</i>)</p> <p>Contoh latihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Tabletop Exercise</i> (TTX) ancaman siber skala nasional.</li> <li>2) <i>Full-scale exercise</i> untuk bencana <i>megathrust</i>.</li> <li>3) <i>Functional exercise</i> untuk krisis energi/<i>blackout total</i>.</li> <li>4) Simulasi harus mencakup <i>stress scenario</i> dan <i>surprise inject</i>.</li> </ol> <p>g. Review dan update berkala</p> <p>Rencana kontinjensi harus diperbarui berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perubahan lingkungan strategis.</li> <li>2) Perubahan teknologi.</li> <li>3) Hasil evaluasi latihan.</li> <li>4) Perubahan struktur organisasi.</li> </ol>
--	---

	<p><b>E. Dampak Kebijakan (<i>Policy Impact Assessment</i>) Polri Terhadap Sektor Lain (Ekonomi, Politik, Sosial)</b></p> <p>1. Pengertian <i>Policy Impact Assessment</i> (PIA)</p> <p>Proses analisis sistematis untuk menilai dampak langsung, tidak langsung, jangka pendek, dan jangka panjang dari kebijakan Polri terhadap berbagai sektor.</p> <p>Dalam konteks kelembagaan Polri, PIA digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan konsekuensi negatif terhadap sektor lain.</p> <p>2. Cakupan PIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan keamanan.</li> <li>b. Efisiensi kebijakan terkait penggunaan sumber daya.</li> <li>c. Dampak lintas sektor (ekonomi, politik, sosial).</li> <li>d. Mitigasi risiko dan dampak tidak diinginkan.</li> </ol> <p>3. Dampak Kebijakan Polri terhadap Sektor Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Stabilitas dan Iklim Investasi <p>Kebijakan Polri dalam menjaga stabilitas Kamtibmas (misalnya pengamanan objek vital, penanganan konflik, penanggulangan kriminalitas) berpengaruh pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) meningkatnya kepercayaan investor.</li> <li>2) turunnya risiko bisnis.</li> <li>3) meningkatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan.</li> </ol> <p>Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.</p> </li> <li>b. Efisiensi rantai pasok dan kelancaran logistik <p>Kebijakan seperti pengamanan arus logistik, pengawalan distribusi bahan pokok, atau operasi penertiban premanisme berdampak langsung pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menurunnya biaya logistik.</li> <li>2) meningkatnya efisiensi distribusi barang.</li> <li>3) terhindarnya gangguan suplai yang dapat memicu inflasi.</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>c. Dampak negatif potensial</p> <p>Beberapa kebijakan represif atau penegakan hukum yang tidak proporsional dapat memunculkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hambatan bagi sektor informal.</li> <li>2) biaya kepatuhan yang tinggi (<i>compliance cost</i>).</li> <li>3) ketidakpastian usaha jika terjadi <i>over-enforcement</i>.</li> </ol> <p>4. Dampak Kebijakan Polri terhadap Sektor Politik</p> <p>a. Stabilitas politik nasional</p> <p>Polri sebagai aktor kunci dalam internal security berperan menjaga stabilitas politik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengamanan pemilu.</li> <li>2) pencegahan konflik komunal.</li> <li>3) mitigasi ancaman radikalisme dan terorisme,</li> <li>4) penanganan demonstrasi dalam koridor hukum.</li> </ol> <p>Hal ini meningkatkan legitimasi proses politik dan kepercayaan masyarakat pada institusi demokrasi.</p> <p>b. Hubungan antar-lembaga dan <i>governance</i></p> <p>Kebijakan Polri yang sinkron dengan pemerintah pusat, Pemda, dan TNI mendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tata kelola pemerintahan yang efektif (<i>effective governance</i>).</li> <li>2) koherensi kebijakan publik.</li> <li>3) stabilitas hubungan antar-aktor strategis.</li> </ol> <p>c. Risiko dampak negatif</p> <p>Jika kebijakan penegakan hukum dipersepsikan tidak adil atau berbau politik, dapat muncul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) polarisasi politik.</li> <li>2) delegitimasi institusi.</li> <li>3) ketidakpercayaan publik yang berdampak pada kualitas demokrasi.</li> </ol> <p>5. Dampak Kebijakan Polri terhadap Sektor Sosial</p> <p>a. Rasa aman dan kohesi sosial</p> <p>Kebijakan Polri dalam penanggulangan kriminalitas dan pelayanan publik (SPKT, patroli, Bhabinkamtibmas) meningkatkan:</p>
--	---


	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) rasa aman masyarakat.</li> <li>2) kerukunan sosial.</li> <li>3) kohesi komunitas.</li> </ol> <p>b. Perubahan perilaku masyarakat</p> <p>Melalui kebijakan edukatif seperti <i>police goes to school</i>, kampanye lalu lintas, dan literasi digital, Polri mendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) budaya tertib.</li> <li>2) kepatuhan hukum.</li> <li>3) penggunaan ruang publik yang sehat.</li> </ol> <p>c. Dampak layanan publik Polri</p> <p>Transformasi digital Polri (misalnya aplikasi digital pelayanan) memberikan dampak sosial seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peningkatan akses layanan.</li> <li>2) pengurangan praktik pungli.</li> <li>3) peningkatan kepercayaan publik.</li> </ol> <p>d. Risiko dampak negatif</p> <p>Jika kebijakan tidak dikomunikasikan baik, dapat muncul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) resistensi masyarakat,</li> <li>2) kesenjangan akses (<i>digital divide</i>).</li> <li>3) stigma terhadap kelompok rentan dalam proses penegakan hukum.</li> </ol> <p>6. Metode Penilaian Dampak Kebijakan Polri</p> <p>a. Analisis kualitatif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) studi kasus.</li> <li>2) wawancara pemangku kepentingan.</li> <li>3) analisis persepsi publik.</li> <li>4) analisis sosial-politik.</li> </ol> <p>b. Analisis kuantitatif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) data kriminalitas.</li> <li>2) indeks persepsi keamanan.</li> <li>3) data ekonomi (inflasi, investasi).</li> <li>4) statistik sosial.</li> </ol>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. <i>Mixed methods</i> Pendekatan yang menggabungkan kualitatif dan kuantitatif untuk hasil analisis komprehensif.</li> <li>d. <i>Tools</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Regulatory Impact Assessment (RIA)</i>.</li> <li>2) <i>Multi-Criteria Analysis (MCA)</i>.</li> <li>3) <i>Cost-Benefit Analysis (CBA)</i>.</li> <li>4) <i>Social Impact Assessment (SIA)</i>.</li> </ul> </li> </ul> <p>7. Implikasi bagi Perumusan Kebijakan Polri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Polri harus berbasis bukti (<i>evidence-based policing</i>) dan mempertimbangkan dampak lintas sektor.</li> <li>b. Koordinasi lintas kementerian/lembaga diperlukan agar dampak kebijakan tidak kontradiktif.</li> <li>c. Transparansi dan akuntabilitas meningkatkan legitimasi kebijakan.</li> <li>d. Partisipasi masyarakat penting dalam mengurangi dampak negatif kebijakan.</li> <li>e. <i>Monitoring and Evaluation (M&amp;E)</i> harus dilakukan secara reguler dengan indikator ekonomi, politik, sosial.</li> </ul>
--	---



## RANGKUMAN

1. Analisis lingkungan strategis sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan keamanan nasional dan penguatan peran Polri pada tingkat strategis. Melalui pendekatan PESTEL, SWOT makro, dan strategic foresight, peserta dibekali kemampuan membaca dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geosiber sebagai variabel lingkungan eksternal yang membentuk pola ancaman dan peluang keamanan nasional. Pendekatan ini memungkinkan Polri merumuskan implikasi kebijakan yang berbasis antisipasi, bukan sekadar respons terhadap krisis.
2. Sistem Keamanan Nasional (Siskamnas) menekankan pemahaman filosofis dan struktural mengenai hubungan antar-subsistem keamanan, serta posisi strategis Polri di dalamnya. Dengan memahami pilar-pilar Siskamnas, dasar hukum, dan mekanisme sinergi antaraktor keamanan, peserta diharapkan mampu mengelola koordinasi lintas sektor secara efektif antara Polri, TNI, badan intelijen, dan lembaga penegak hukum lainnya guna menjaga stabilitas keamanan nasional secara menyeluruh.
3. Siklus kebijakan keamanan, berbagai model pengambilan kebijakan, serta pentingnya dukungan analisis dari *think tank* dan akademisi. Pendekatan kebijakan adaptif dan penyusunan rencana kontinjensi strategis menjadi kunci dalam menghadapi ancaman berdampak tinggi yang sulit diprediksi, sehingga Polri mampu bertindak cepat dan tepat dalam situasi krisis.
4. Implementasi dan evaluasi Siskamnas serta penguatan kepemimpinan strategis Polri, fokus diberikan pada pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian dan koordinasi tingkat tinggi antarinstansi strategis negara. Seluruh rangkaian pokok bahasan ini bermuara pada pembentukan *leadership legacy* pimpinan Polri yang berorientasi pada ketahanan nasional, stabilitas keamanan jangka panjang, dan kemampuan institusi menghadapi tantangan keamanan abad ke-21 secara adaptif dan berkelanjutan.

	<p><b>LATIHAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan bagaimana dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geosiber membentuk lingkungan strategis keamanan nasional Indonesia. Analisis bagaimana Polri dapat menggunakan pendekatan PESTEL, SWOT, makro, dan <i>strategic foresight</i> untuk merumuskan implikasi kebijakan keamanan di tingkat nasional!</li> <li>2. Uraikan konsep Siskamnas dan bedakan dengan Sistem Pertahanan Negara. Analisis peran strategis Polri dalam menjaga sinergi antar-subsistem keamanan serta mekanisme koordinasi yang efektif dengan TNI, badan intelijen, dan lembaga penegak hukum lainnya!</li> <li>3. Jelaskan siklus kebijakan keamanan nasional dan bandingkan penerapan model <i>Rational-Comprehensive dan Incremental Policy Making</i> dalam menghadapi dinamika ancaman yang cepat berubah. Analisis peran think tank dan akademisi dalam mendukung kebijakan keamanan yang adaptif dan berbasis analisis lingkungan strategis!</li> <li>4. Dalam menghadapi ancaman berdampak tinggi dan berprobabilitas rendah (<i>high-impact, low-probability threats</i>), jelaskan pentingnya rencana kontinjensi strategis dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Analisis bagaimana kepemimpinan strategis Polri dan koordinasi tingkat tinggi lintas kementerian/lembaga dapat membentuk <i>leadership legacy</i> yang memperkuat ketahanan dan stabilitas keamanan nasional!</li> </ol>